

RELOKASI INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh: Bagja Waluya^{*)}

Abstrak

Kabupaten Bandung sudah terkenal dengan industri tekstilnya. Selain itu juga berkembang industri garmen sebagai industri lanjutannya dan industri-industri yang tidak berkaitan dengan tekstil lainnya. Peran industri terhadap perekonomian Kabupaten Bandung pun cukup besar, baik terhadap pendapatan daerah maupun ketersediaan lapangan kerja. Perkembangan industri yang membawa berkah dari sudut ekonomi ini, ternyata juga membawa dampak lain. Terhadap lingkungan, industri ini membawa dampak negatif misalnya terhadap persediaan air. Dengan banyaknya industri yang membuat sumur artesis ini, maka laju produksi (discharge) air tanah lebih besar dari laju pengisiannya (recharge). Akibatnya, permukaan air tanah makin lama makin dalam.

Untuk mengurangi dampak tersebut salah satunya dengan memindahkan industri (relokasi industri) yang disertai dengan rencana yang matang baik mengenai perkembangan kawasan industri baru, maupun wilayah-wilayah yang seharusnya ditutup untuk industri.

Kata kunci: *Relokasi, Industri, Water Supply.*

^{*)} Bagja Waluya, S.Pd, adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI

1. Pendahuluan

Catatan sejarah perkembangan perindustrian di Indonesia, Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah industri yang terpenting di negara ini. Hal tersebut dimungkinkan karena Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki lokasi strategis untuk tumbuh dan berkembangnya sektor industri. Aktivitas perekonomian yang tinggi, letaknya yang berdekatan dengan Jakarta sebagai pusat pemasaran, kondisi morfologi yang relatif datar, ketersediaan air yang berlimpah, dan jumlah penduduk yang banyak merupakan faktor-faktor lokasi yang diharapkan bagi keberadaan industri.

Faktor-faktor lokasi tersebut sangat menentukan karakteristik industri yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bandung. Ketersediaan jumlah tenaga kerja yang besar dengan kualifikasi pendidikan yang rendah banyak tersedia di wilayah ini. Dengan demikian, industri yang berkembang pun merupakan industri yang bersifat membutuhkan tenaga kerja yang banyak, seperti industri tekstil dan garment. Tingkat pendidikan dan keahlian bukan merupakan tuntutan utama pada kedua industri tersebut. Hal ini dimungkinkan karena di dalam proses produksinya tidak atau kurang terdapat pengerjaan yang rumit sehingga memerlukan keahlian yang tinggi. Sebagian besar tenaga kerjanya adalah berpendidikan SD dan SMP, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.

Industri-industri yang sangat terkenal di wilayah ini selama sejarah perkembangan industri seperti Patal Padalarang, Patal Banjaran, dan Patal Majalaya. Sejak tahun lima puluhan, kota Majalaya di Kabupaten Bandung sudah terkenal dengan industri tekstilnya. Perkembangan selanjutnya ternyata menunjukkan kota-kota lain di sekitarnya pun berkembang menjadi kota industri. Kita sebut saja Kecamatan Cimahi Selatan, Leuwigajah (keduanya sekarang masuk daerah batas kota Cimahi), Dayeuhkolot, Banjaran, Cikancung, dan sebagainya. Industri yang berkembang pun ternyata tidak hanya tekstil. Kini, ada industri garmen sebagai industri lanjutannya. Juga berkembang industri-industri yang tidak berkaitan dengan tekstil seperti industri

makanan dan mainan, kimia, kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya, industri barang-barang dari logam, dan industri lainnya.

Kegiatan industri yang dilaksanakan di suatu wilayah tentunya dapat menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya, baik sifatnya positif maupun negatif. Pengaruh kegiatan industri yang positif, dalam arti mendukung ke arah kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia hendaknya terus dikembangkan, sedangkan yang sifatnya negatif perlu dihindari atau diminimalisasi. Beberapa pengaruh positif kegiatan industri antara lain kegiatan ekonomi sektor industri mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, meningkatkan devisa bagi negara, tidak selalu menggantungkan diri terhadap barang-barang impor, dapat membangkitkan ekonomi penduduk sekitar kawasan industri.

Keberadaan industri-industri di Kabupaten Bandung berperan sangat besar terhadap peningkatan perekonomian. Kabupaten Bandung adalah salah satu dari sedikit kabupaten di Jawa Barat yang produk domestik brutonya terutama berasal dari sektor industri. Industri yang menyediakan lapangan kerja, memberikan pemasukan bagi PAD dalam bentuk PBB yang lebih tinggi, memberikan pemasukan dari berbagai retribusi dan sebagainya.

Adapun pengaruh negatif yang dapat timbul antara lain: sering kali pembuangan limbah cair yang dialirkan ke sungai atau badan-badan air lainnya menimbulkan pencemaran air, apabila tidak dinetralkan terlebih dahulu, asap pabrik sebagai sisa pembakaran dapat menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan bahang kota atau kenaikan suhu udara di wilayah perkotaan, kegiatan industri terkadang mengakibatkan kebisingan atau polusi suara, kesehatan manusia dapat terganggu oleh polusi udara, air dan tanah. Berkembangnya industri di perkotaan terkadang mengakibatkan gejala urbanisme pada tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan yang sering kali bersifat negatif.

Demikian halnya dengan keberadaan industri-industri di Kabupaten Bandung, selama beberapa tahun terakhir kerap menjadi suatu permasalahan terutama terhadap kelestarian dan pencemaran lingkungan di sekitarnya.

2. Masalah

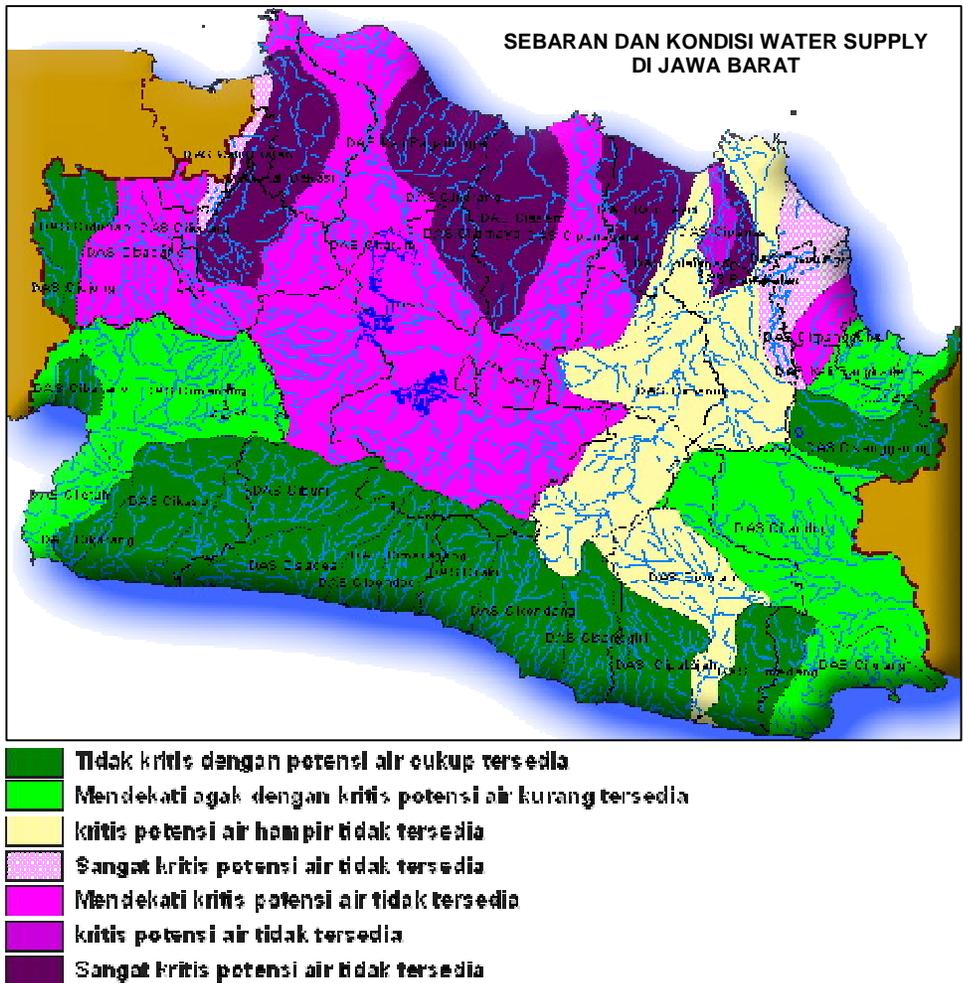
Perkembangan industri yang membawa berkah dari sudut ekonomi ini, ternyata juga membawa dampak lain. Terhadap lingkungan, industri ini membawa dampak negatif misalnya terhadap persediaan air di Kabupaten Bandung.

Industri yang berkembang di Kabupaten Bandung ini, banyak yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Cara yang paling murah untuk mendapatkan air adalah dengan memanfaatkan air tanah dalam bentuk sumur artesis. Dengan banyaknya industri yang membuat sumur artesis ini, maka laju produksi (*discharge*) air tanah lebih besar dari laju pengisiannya (*recharge*). Akibatnya, permukaan air tanah makin lama makin dalam.

Berdasarkan data tahun 1997, permukaan air tanah di Cimahi Selatan, Leuwigajah, dan Cibereum adalah 98,25 meter. Ini berarti, untuk mendapatkan air, kita harus mengebor sampai kedalaman lebih besar dari 98,25 meter. Padahal permukaan air tanah di wilayah tersebut pada tahun 1928 adalah 18,5 meter. Artinya air keluar dalam bentuk mata air, tanpa harus digali. Hal sama terjadi di wilayah-wilayah industri lainnya seperti Dayeuhkolot tahun 1997 (-43,20)-(-84,20), tahun 1958 +4,30; Majalaya tahun 1997 (-34,64)-(-51,45), tahun 1980 +2,80; Banjaran dan Pameungpeuk, tahun 1997 (-12,29)-(-34,12), tahun 1980 +4,20; dan seterusnya.

Keadaan ini membuat air di wilayah tersebut menjadi sangat sulit didapat. Hal ini tidak saja dirasakan oleh industri yang memang menjadi penyebabnya tetapi terutama dirasakan oleh penduduk. Penduduk menjadi sukar untuk mendapatkan air, karena sumurnya kering. Air permukaan (air sungai, kolam, situ, dan sebagainya) juga sukar didapat karena banyak yang pada waktu tertentu menjadi kering. Jika pun ada air, seringkali tercemar limbah industri. Akibatnya, penduduk banyak yang menderita penyakit seperti gatal-gatal. Demikian halnya dengan air untuk pertanian. Sudah barang tentu ini menjadi masalah yang sangat besar mengingat air merupakan kebutuhan pokok manusia.

Kondisi ketersediaan air tanah yang sangat kritis di Kabupaten Bandung dan sekitarnya, dapat dilihat pada peta sebaran dan kondisi *Water Supply* di Jawa barat.

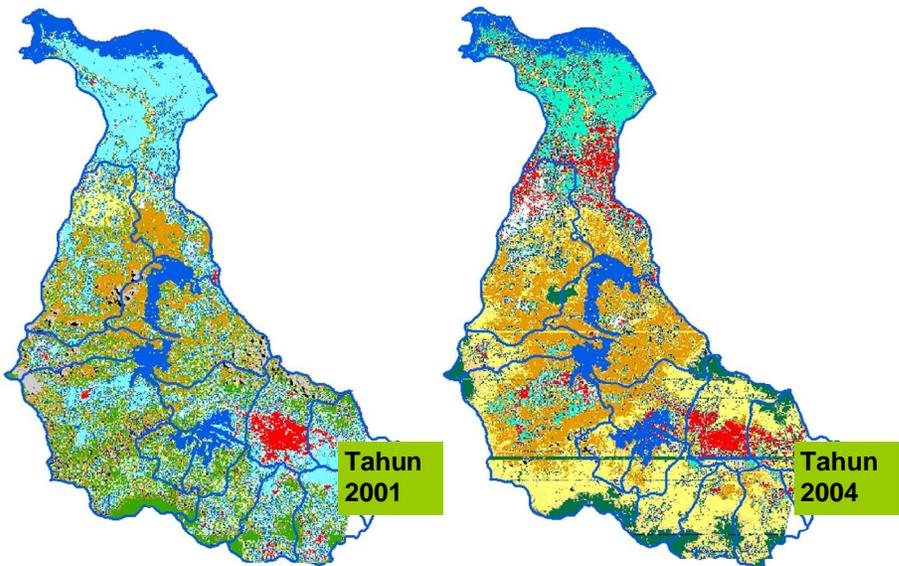


Apabila kita melihat peta tersebut, maka kondisi ketersediaan air tanah di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya berada pada tingkat mendekati kritis dan kritis. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya konversi lahan di wilayah ini yang terjadi secara besar-besaran dari lahan terbuka hijau menjadi pemukiman termasuk di dalamnya sektor industri dengan berdirinya pabrik-pabrik besar yang membutuhkan cadangan ketersediaan air yang besar pula. Lebih jelasnya data dan gambaran perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung dapat

dilihat pada Peta Sebaran Perubahan Luas Penggunaan Lahan di DAS Citarum berikut ini:

**Perubahan luas penggunaan lahan DAS Citarum
(2001-2004)**

NO	TATA GUNA LAHAN	NOTASI	%PERUBAHAN	LUAS(HA)
1	Perumahan		26.64%	24,326.22
2	Lahan Terbuka		-38.75%	-21,333.56
3	Sawah		-43.37%	-84,866.88
4	Hutan		-55.05%	-81,080.36
5	Kebun dan Teh		43.80%	85,481.34
6	Tegalan dan belukar		79.10%	106,612.06



**Sebaran Perubahan luas penggunaan lahan
DAS Citarum (2001-2004)**

3. Relokasi

Untuk mengurangi dampak di atas, caranya adalah dengan mengurangi *discharge* air, dan menambah *recharge*-nya. Mengurangi *discharge* air yang cukup kentara adalah dengan menghentikan pengambilan air untuk industri. Caranya, pertama, mengganti pemenuhan kebutuhan air tanah dengan mengalirkan air permukaan (air sungai, waduk, dan sebagainya) ke wilayah-wilayah industri. Cara kedua adalah memindahkan industri ke tempat dimana didapat air permukaan. Kelihatannya cara kedua inilah yang dinilai lebih menguntungkan oleh Pemkab Bandung. Hal ini terlihat dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Bandung 1998-2007.

Dalam RTRW dinyatakan, setelah tahun 2000 direncanakan relokasi industri dengan cara membangun kawasan industri di Cililin 1.000 ha dan Cipeundeuy 1.800 ha. Kedua lokasi tersebut dinilai menguntungkan menjadi kawasan industri. Alasannya, lokasinya hanya berjarak 4 km dari Tol Cikampek-Padalarang-Cilenyi dan dekat dengan aglomerasi industri di Cimahi-Batujajar. Kemudian, kawasannya relatif datar, terdapat sumber daya air permukaan dalam debit yang besar, terletak di hilir sungai Citarum sehingga limbah airnya tidak mengganggu masyarakat, dan terdapat bukit yang dapat digunakan sebagai lokasi reservoir air, sehingga air dapat dialirkan secara gravitasi, jadi murah. Lalu, penggunaan tanahnya sekarang berupa sawah tadah hujan dan kebun/pertanian kering, sehingga potensinya relatif kurang. Wilayah ini cocok untuk dikembangkan menjadi wilayah perkotaan.

Bahwa di kedua tempat tersebut terdapat sumber daya air permukaan dan terletak di hilir, masih dipertanyakan. Sekarang, di musim kemarau debit air sungai Citarum sangat kecil, dan letaknya pun masih di hulu. Limbahnya dapat mengganggu perikanan di Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur serta keperluan air untuk penduduk sungai di Pantura.

Kedua kawasan tersebut kelihatannya akan ditata dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan, karena dalam RTRW dinyatakan bahwa kawasan juga dilengkapi dengan reservoir air, instalasi pengolahan limbah cair dan instalasi pengolahan limbah padat. Dengan

demikian terlihat, bahwa dibangunnya kedua kawasan industri tersebut telah dapat memecahkan masalah dengan baik.

4. Tinjauan

Tinjauan sepintas memperlihatkan, dengan dilakukannya relokasi industri ke Cililin dan Cipeundeuy tersebut, masalah dalam kegiatan industri teratasi. Akan tetapi benarkah demikian?

Seperti dinyatakan sendiri dalam RTRW Kabupaten Bandung, sebetulnya gagasan untuk mengembangkan kawasan industri ini telah muncul sejak tahun 1989. Akan tetapi gagasan tersebut tak pernah terwujud, karena masih kurangnya minat investor. Investor lebih tertarik untuk membangun di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, karena lokasinya lebih menguntungkan. Persoalannya sekarang, jika pada tahun 1989 saja ketika ekonomi sedang "booming" investor sudah tidak tertarik, apalagi sekarang, ketika ekonomi terutama industri sedang sangat lesu. Jika pada tahun 1989 saingannya hanya wilayah sekitar Jabotabek, maka kini terdapat saingan yang sangat kuat untuk industri tekstil dan garmen dari Vietnam.

Apalagi adanya aturan WTO yang menghapuskan semua kuota, maka industri Indonesia (dalam hal ini Kab. Bandung) harus bersaing keras di pasar internasional. Industri makanan dan minuman harus bersaing keras dengan Thailand yang memang pembangunannya dititikberatkan pada pembangunan pertanian. Secara umum seluruh industri di Asia Tenggara khususnya Asia umumnya, harus bersaing keras dengan Cina. Cina merupakan negara yang menarik untuk perkembangan industri karena upah yang rendah, etos kerja yang tinggi birokrasi yang bersih, serta sumber sumber daya alam yang banyak.

Dengan persaingan yang begitu tingi maka perkembangan industri di Indonesia sedang dalam masa sulit. Oleh karena itu, jika pada tahun 1989 saja sudah sulit untuk membangun kawasan industri, apalagi sekarang. Persoalan lain adalah pada "nasib" wilayah-wilayah industri yang sekarang ada. Dalam RTRW tahun 1989-2007 dikatakan bahwa pengembangan kawasan industri di Cililin/1.000 ha, dan Cipeundeuy 1.600 ha, merupakan relokasi. Hal ini berarti bahwa terjadi pemindahan lokasi industri ke Cililin dan Cipeundeuy. Jika melihat masalah yang

sekarang ada, maka berarti industri yang berpindah adalah industri dari wilayah Banjaran, Majalaya, Leuwigajah, dan sebagainya yang sekarang sudah memunyai masalah lingkungan yang parah.

Apabila betul relokasi tersebut berasal dari wilayah-wilayah di atas, maka muncul 2 pertanyaan. Pertama, apakah betul bahwa industri-industri di wilayah di atas bersedia pindah ke kawasan industri baru? Pemandangan lokasi industri memerlukan biaya yang sangat mahal. Walaupun di wilayah-wilayah sekarang diberi disinsentif misalnya dengan cara meningkatkan harga air tanah, tetap harus ada suatu *cost-benefit analysis* untuk memastikan bahwa lokasi kawasan-kawasan industri baru lebih menguntungkan. Ini adalah *cost-benefit analysis* dari sudut industri secara individu. Pemkab pun harus membuat *cost-benefit* dari menaikkan harga air tanah dengan *cost* dari kerusakan lingkungan. Apabila *cost*-nya lebih besar, maka cara yang paling mungkin ditempuh adalah dengan menutup sama sekali wilayah-wilayah tersebut untuk penggunaan industri. Industri diharuskan berelokasi ke kawasan industri Cililin dan Cipeundeuy.

Pertanyaan kedua, apabila betul wilayah-wilayah industri tersebut akan ditutup, bagaimana "nasib" wilayah-wilayah yang ditinggalkannya? Sekarang, wilayah-wilayah itu dasar ekonominya industri. Jika industri pindah dari sana, apa dasar ekonominya yang baru? Hal ini harus diperhitungkan dan direncanakan dengan matang oleh Pemkab. Kalau tidak, wilayah ini akan merupakan wilayah yang secara sosial-ekonomi bermasalah, serta secara fisik merupakan wilayah kumuh.

Pertanyaan lain adalah apakah betul Pemkab akan merelokasi industri atau membuka kawasan industri baru? Hal ini dipertanyakan karena menurut RTRW 1998 di Kabupaten Bandung akan terdapat 1.000 ha kawasan industri di Cililin, 1.600 ha kawasan industri di Cipeundeuy, serta wilayah-wilayah zona prioritas industri di Rancaekek, Majalaya, Cicalengka, Cikancung, Cimahi Selatan, Padalarang. Berarti minimal terdapat 2.600 Ha, ditambah wilayah industri yang sekarang sudah berkembang. Menurut Perda tahun 2001 mengenai RTRW Kabupaten Bandung, jumlah luas wilayah industri adalah 1.500 ha di kawasan industri Cipeundeuy, 400 ha di kawasan industri Margaasih, 2.500 ha di kawasan industri terpadu di Tegalluar (Bojongsoang), serta zona-zona

industri di wilayah-wilayah industri yang sekarang sudah berkembang. Jika dijumlahkan seluruhnya mencapai 5.011 ha. Kedua jumlah tersebut merupakan angka yang besar sekali, karena pada tahun 1999 penggunaan lahan untuk industri hanya 1.845 ha, ditambah sekira 1.000 ha di Kota Bandung. Jelas bahwa peruntukkan lahan industri sebesar 5.011 Ha untuk 10 tahun yang akan datang adalah suatu pemborosan.

Dengan demikian jika betul kawasan-kawasan industri tersebut akan dibangun, beberapa wilayah atau zona industri yang sekarang mengalami gangguan lingkungan yang parah harus ditutup. Jika betul ditutup, kita kembali ke pertanyaan No. 2 di atas.

5. Penutup

Dengan melihat uraian di atas, jelas bahwa relokasi industri di Kabupaten Bandung bukan merupakan masalah sederhana. Hal ini harus disertai dengan rencana yang matang baik mengenai perkembangan kawasan industri baru, maupun wilayah-wilayah yang seharusnya ditutup untuk industri.

Pertimbangan untuk penutupan wilayah industri lama, harus dikaji dengan cermat, dan hasilnya dapat dimasukkan dalam revisi RTRW yang sekarang sudah seharusnya dilakukan. Rencana rinci, baik kawasan industri baru, maupun wilayah yang ditinggalkan oleh industri, harus disusun. Jelasnya, jika industri-industri dalam kegiatan produksinya hanya memperhitungkan keuntungan finansial, maka relokasi merupakan hal yang merugikan karena mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk berpindah dan membangun kembali di lokasi baru tersebut. Akan tetapi, jika industri-industri tersebut lebih memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka sebetulnya kerugian jauh lebih besar lagi karena kerusakan lingkungan menimbulkan dampak yang tidak hanya bagi keberlangsungan produksi industri tetapi juga telah menjadi permasalahan berbagai sektor kehidupan. Untuk itu, perkembangan industri yang berbasis lingkungan harus dikedepankan guna mengurangi dampak negatifnya. Selama ini, banyak industri yang belum memasukkan dampak dan kelestarian lingkungan sebagai salah satu faktor biaya produksinya.

Daftar Pustaka

- Bale, 1977, *Industry Geography*. New York.
- BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2006. Bandung.
- Idris Abdurachmat & Enok Maryani, 1998, *Geografi Ekonomi*, Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Bandung.
- John W.Alexander, 1963, *Economic Geography*, New York: Prentice Hall Inc.
- Siti Sutriah Nurzaman, Soal Relokasi Industri di Kabupaten Bandung, *Artikel Pikiran Rakyat*, Kamis 26 Februari 2004, Bandung: PT. Granesia.